

Implikasi hukum atas kedudukan hukum ketetapan Majelis  
Permusyawaratan Rakyat dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011  
tentang pembentukan peraturan perundang-undangan = Legal  
implication to the position of MPR decree regarding to Law number 12  
year 2011 concerning forming of legislation / Yunita Rhamadani

Yunita Rhamadani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20349224&lokasi=lokal>

---

Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Tesis ini membahas mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia setelah terjadinya Perubahan UUD 1945, karena terjadi perubahan penting terutama pada perubahan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) baik dari segi fungsi maupun struktur. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, dan pemegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setelah perubahan UUD 1945 Ketetapan MPR tidak dimasukkan ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kini dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Ketetapan MPR kembali ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menimbulkan implikasi baik terhadap MPR sebagai lembaga negara, terhadap Ketetapan MPR sebagai produk hukum, maupun terhadap konsekuensi pengujian terhadap Ketetapan MPR tersebut.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This study is focus to The Indonesian Constitutional system after The amandements of 1945 Constitution (UUD 1945), because there are significant reformation happened specially to the reposition of People Consultative Assembly (MPR) both function and structure. Its no longer become the highest state organ in Indonesia, neither as a holder of peoples sovereignty. That MPR's reposition also effecting the hierarchy of Indonesian Legislations. After the constitution amandements, MPR Decree was eliminated from the hiearchy. But now, by the Law number 12 year 2011 concerning Forming of Legislation, The MPR Decree back to the hierarchy. It will cause some implication, implication to the MPR as a state organ, implication to the MPR Decree as a legislation product, and implication for the review consequences to the MPR Decree itself.